



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

RESPONS TIMUR TENGAH TERHADAP PROVOKASI *RULLING PARTY* DI INDIA

Ziyad Falahi
Peneliti Ahli Pertama
ziyad.falahi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sebanyak enam belas dari lima puluh tujuh negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau yang dahulu disebut Organisasi Konferensi Islam mengajukan respons dalam bentuk protes kepada partai berkuasa di India, Bharatiya Janata Party (BJP). Negara-negara tersebut di antaranya adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Kuwait, Mesir, Yordania, Oman, Pakistan, Bahrain, Maladewa, Malaysia, Turki, Pakistan, Libya, dan Maladewa. OKI bahkan meminta kesediaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melindungi minoritas muslim di India dalam bentuk jaminan.

Sementara itu, Qatar, Iran dan Kuwait telah memanggil duta besar India untuk mengklarifikasi pandangan tersebut sekalipun Partai pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi itu telah memecat Nupur Sharma dan Jindal, karena komentar kontroversialnya itu. Namun implikasi sudah terlanjur meluas, di mana sejumlah umat Muslim turun ke jalan untuk memprotes komentar anti-Islam yang dibuat oleh dua anggota Partai Nasionalis Hindu Nupur Sharma dan Naveen Kumar Jindal. Nupur Sharma, yang merupakan juru bicara Partai Janata mengeluarkan pernyataannya dalam debat yang disiarkan televisi bulan lalu. Kemudian Naveen Jindal yang tidak lain merupakan kepala media dari unit Delhi partai tersebut, mengunggah komentar di media sosial tentang hal yang sama. Kasus tersebut merupakan klimaks dari adanya tekanan BJP terhadap kebebasan beribadah dan juga kebebasan dalam berjilbab.

Pernyataan itu bahkan menimbulkan tantangan diplomatik besar-besaran bagi pemerintah Narendra Modi. Sebaliknya, beberapa pejabat dan tokoh Hindu India bersikeras untuk menolak nota protes diplomatik. Hal tersebut direpresentasikan dengan pernyataan Ketua Menteri di Negara Bagian Maharashtra, Uddhav Thackeray, yang menyatakan bahwa negaranya tidak perlu meminta maaf atas kesalahan yang dibuat oleh BJP. Uddhav lebih lanjut menyatakan bahwa tindakan negara-negara Arab telah meminta negaranya bertekuk lutut dan meminta maaf, padahal komentar ataupun pendirian BJP bukanlah pendirian negara. Oleh karenanya tidak pantas bagi India untuk tunduk begitu saja pada negara Arab.

Menanggapi polemik tersebut, Dewan Kerja Sama Teluk (*Gulf Cooperation Council/GCC*) juga melakukan tindakan mengutuk, bahkan mencela tindakan tersebut. GCC, sebagai payung kerja sama di antara enam negara, merupakan tujuan utama para pekerja India di luar negeri. Terhitung 8,7 juta dari 13,5 juta total pekerja India yang menjadi diasporadi seluruh dunia bermukim di negara-negara teluk. Lebih dari itu, Kuwait dari laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan mengimpor 95 persen makanannya dari India. Namun, seiring dengan kasus penghinaan tersebut, Kuwait memboikot produk India, diberitakan Swalayan yang banyak menumpuk teh beserta produk India ke sebuah *trolley* untuk dibuang. Sedangkan Lukisan seniman Qatar yang menyinggung agama Hindu semakin mempertegang hubungan kedua negara.

Ketegangan internasional dapat memperluas eskalasi konflik setelah aparat sipil India justru melakukan tindakan represif. Polisi di Uttar Pradesh menangkap 400 aktivis yang diduga terlibat dalam demonstrasi. Bahkan kepala menteri bagian Uttar Pradesh, Yoga Adityanath, menganjurkan agar rumah-rumah yang terkait dengan kerusuhan akan dihancurkan termasuk tempat-tempat ilegal yang diduga dimiliki oleh demonstran. Tidak segan-segan, sebagaimana juga diberitakan, Pemerintah India akan segera mengeluarkan *National Security Act* (NSA) untuk mengindari perluasan demonstrasi.

Atensi DPR

Seiring dengan memanasnya kondisi India pasca-pembongkaran dan penangkapan para demonstran, DPR RI khususnya Komisi I dalam melaksanakan fungsi pengawasan, perlu memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia di India bersama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Selain itu, tugas besar Kementerian Perdagangan, yang sejak 14 Mei 2022 berencana akan mencanangkan hubungan kerja sama ekonomi jangka panjang hingga 2025 sekitar 50 miliar dollar AS, maka Kemenlu harus dapat melakukan penjelasan kepada India agar keseriusan Indonesia atas kasus provokasi rasial tidak mengganggu agenda perdagangan tersebut. Selain itu, DPR melalui Komisi I perlu untuk menjaga soliditas bersama umat Islam di Indonesia, sebagai negara demokrasi berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Sumber

Media Indonesia, 11 Juni 2022;
Republika, 9 dan Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



 @puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q
Riyadi Santoso
Ari Muliarta Ginting
Venti Eka Satya
Rafika Sari

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.